



PENINGKATAN KAPASITAS KERJASAMA KELEMBAGAAN DALAM IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA

INCREASING THE CAPACITY OF INSTITUTIONAL COOPERATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE INDEPENDENT CAMPUS

¹Artono Dwijo Sutomo, ²Budi Legowoz, ³Tri MurwaningsiAnjar Sri Ciptorukmi N,
⁴Bambang Kusharjanta, ⁵Salim Widono, ⁶Yudho Taruno Muryanto, ⁷Sarwiji Suwandi,
⁸Setyo Sri Rahardjo, ⁹Sri Marmoah.

¹⁻⁹Universitas Sebelas Maret

Corresponding author: artono@staff.uns.ac.id

Abstrak

Perlu adanya upaya implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada perguruan tinggi. Tetapi beberapa perguruan tinggi yang tergolong muda masih memiliki keterbatasan sumber daya. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Metode penelitian pengabdian ini meliputi analisis situasi, pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai tahap kerjasama dan metode pelaksanaannya. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah terjadinya MoU kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menyukseskan implementasi kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Hasil lainnya adalah terlaksana workshop dan pertukaran pelajar sebagai implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengambil sebanyak 2 semester (setara 40 sks) serta dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Hal ini berarti SKS yang wajib diambil di program studi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang dijalankan. Satuan kredit semester selanjutnya didefinisikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Universitas Sebelas Maret saat ini memiliki 106 program studi terakreditasi Unggul, 56 program studi terakreditasi Baik Sekali, dan 8 prodi terakreditasi Baik. Tenaga pendidik tercatat sebanyak 1626 dosen ber-NIDN, 4 dosen ber-NIDK dan 17 dosen ber-NUP. Rasio dosen dan mahasiswa berdasar data semester genap 2019 sebesar 1667 : 39350. Kegiatan MBKM Universitas Sebelas Maret dilaksanakan sesuai Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 31 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana. Implementasi 9 bentuk kegiatan belajar di luar kampus di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (LPPMP UNS). Ujicoba program MBKM tahun pertama fokus pada kegiatan Pertukaran Mahasiswa



lintas Program Studi di dalam Universitas Sebelas Maret. Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) berdiri pada tanggal 8 Januari 1999. Saat ini tercatat memiliki 15 prodi dengan satu akreditasi Baik dan Baik Sekali. Rasio dosen : mahasiswa tercatat sebesar 132 : 4001. Seperti halnya universitas muda lainnya, kurangnya sumberdaya menjadi kendala pengembangan lembaga. Sinergi pengembangan sesuai arah kebijakan pengembangan pendidikan tinggi masih sangat perlu dilakukan. Peningkatan kerjasama kelembagaan dalam program pengabdian masyarakat P2M PNBP Universitas Sebelas Maret diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan percepatan implementasi kebijakan pemerintah, utamanya dalam implementasi program MBKM.

IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Implementasi dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) masih perlu dikembangkan. Hal ini mengingat keterbatasan sumber daya manusia pada UMP yang tergolong kampus muda. Peningkatan sinergi untuk menindaklanjuti kebijakan pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut, dasar pemikiran permasalahan yang terjadi adalah bagaimana meningkatkan kapasitas kampus dalam menindaklanjuti program-program di tengah keterbatasan sumber daya manusia.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Tujuan penelitian ini adalah kerjasama kelembagaan dalam program pengabdian masyarakat P2M PNBP Universitas Sebelas Maret dengan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Manfaat dari kegiatan ini adalah mempercepat implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Purworejo.

PELAKSANAAN KEGIATAN

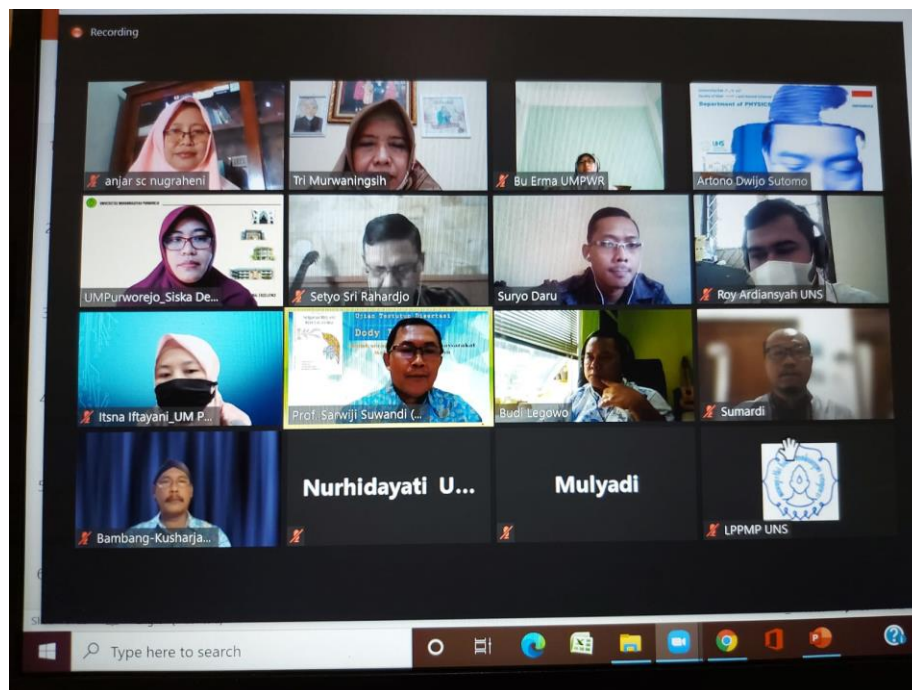
Analisis Situasi

Universitas Muhammadiyah Purworejo merupakan satu-satunya perguruan tinggi setingkat universitas yang ada di Purworejo. sesuai Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 05/D/0/1999 tanggal 8 Januari 1999, Universitas Muhammadiyah Purworejo resmi menjadi tingkat universitas setelah sebelumnya berada di tingkat institut. Berdasarkan data lembaga 4ICU pada tahun 2018

menyebutkan bahwa Universitas Muhammadiyah Purworejo berada di peringkat 8 dari seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia (UMPwr, 2018).

Universitas Muhammadiyah Purworejo saat ini memiliki 5 fakultas yaitu: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Sosial. Saat ini terdapat 15 Program Studi dengan status akreditasi Baik Sekali 11 Program Studi dan Baik 4 Prodi. Sumber daya tenaga pendidik sebanyak 132 dosen yang terdiri atas 121 dosen tetap dan 11 dosen tidak tetap. Jumlah mahasiswa terdaftar sampai pada semester genap 2019 sebanyak 4001 mahasiswa. Rasio dosen tetap : jumlah mahasiswa tertinggi di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebesar 1 : 69 dan terendah di Program Studi Pendidikan Fisika sebesar 1 : 3 (Kemdikbud, 2020).

Persiapan implementasi MBKM di Universitas Muhammadiyah Purworejo sudah dimulai sejak akhir 2020. Hibah penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dari Kemendikbud di raih oleh Program Studi Pendidikan Matematika bersama 6 Program Studi lainnya. Hibah ini digunakan untuk merancang Kurikulum Pendidikan Matematika yang menerapkan kebijakan MBKM. Rencananya kurikulum MBKM ini akan diterapkan pada semester ganjil 2021/2022 (UMPwr, 2020).



Gambar 1 FGD Kurikulum MBKM Pendidikan Matematika 17 Oktober 2020

Kerjasama kelembagaan dalam rangka implementasi MBKM juga sudah mulai dilakukan. Telah dilakukan Penandatanganan naskah kerjasama penerapan kurikulum MBKM dengan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan BMT Binamas Purworejo dengan Fakultas Ekonomi pada tanggal 23 November 2020.

Pendatangan kerjasama tersebut merupakan salah satu program hibah penerapan kurikulum MBKM dari Kemendikbud periode bulan September-Desember 2020. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kemudahan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kampus, khususnya melalui kegiatan magang industri (Ahmad, N. 2020).



Gambar 2 Penandatanganan MoU PDU-BMT Binamas- FE UMP 23 November 2020

Workshop Kewirausahaan MBKM telah juga dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan pada tanggal 9 November 2020. Pada kesempatan yang sama dilakukan juga penantangan naskah kerjasama dengan mitra Balai Latihan Kerja terutama bengkel custom motor. Implementasi kewirausahaan MBKM di Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif di laksanakan pada semester 7 dengan pengakuan kredit sebesar kurang lebih 6 SKS (Sujono. 2020).



Gambar 3 Workshsop Kewirausahaan MBKM Prodi PT On UMP 19 November 2020



Hingga saat ini pertukaran pelajar, magang industri, dan kegiatan keriausahaan menjadi program implemntasi MBKM di UMPwr yang sudah matang persiapannya. Peningkatan kapasitas kerjasama kelembagaan untuk 8 model kegiatan MBKM Kemendikbud masih perlu ditingkatkan. Universitas Sebelas Maret ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 (HUMAS-UNS, 2020). Universitas Sebelas Maret saat ini memiliki 106 program studi terakreditasi Unggul, 56 program studi terakreditas Baik Sekali, dan 8 prodi terakreditasi Baik (Kemdikbud, 2020). Pendampingan dalam bentuk Workshop dan Diskusi Terpumpun dalam upaya peningkatan kapasitas kerjasama kelembagaan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Kurikulum MBKM sangat perlu dilakukan. Jarak antara Unversitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Purworejo sejauh 130 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam memungkinkan untuk melakukan kegiatan pendampingan, implementasi dan evaluasi redistribusi mata kuliah dan rekognisi MBKM.

Permasalahan Mitra

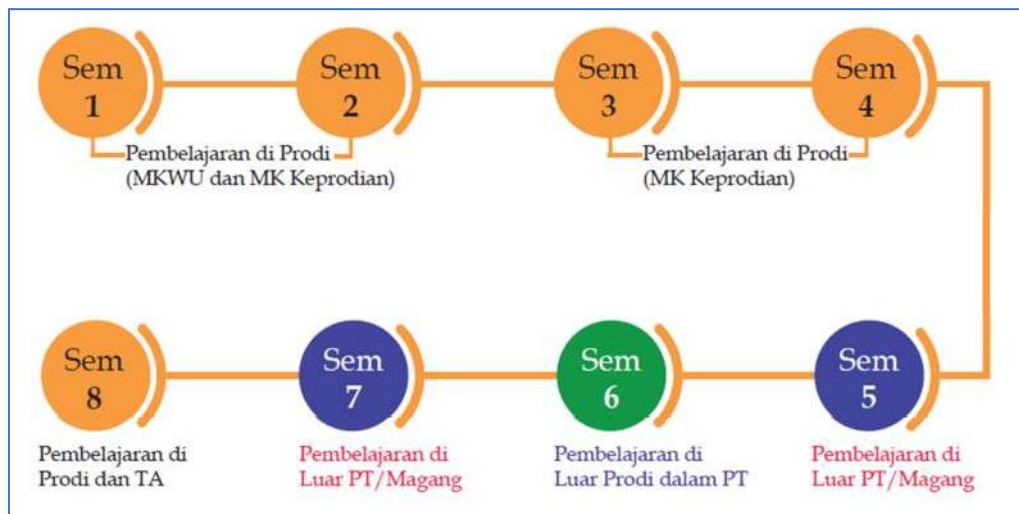
Kebijakan MBKM memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengambil sebanyak 2 semester (setara 40 SKS) serta dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS). Hal ini berarti SKS yang wajib diambil di program studi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang dijalankan. Satuan kredit semester selanjutnya didefinisikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar.

Hak belajar tiga semester di luar program studi sebagai bagian dari kebijakan MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *hard skills* maupun *soft skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Program Studi di Universitas Muhammadiyah Purworejo sudah melakukan rekonstruksi Kurikulum Merdeka Belajar. Redistribusi matakuliah dengan beban studi untuk sekurang-kurangnya sebesar 84 sks yang diselenggarakan dalam 5 (lima) semester untuk memfasilitasi kegiatan MBKM perlu mendapat perhatian khusus agar tidak merugikan mahasiswa dalam pelaksanaannya (LPPMP-UNS, 2020).

Hak belajar mahasiswa di luar program studi dapat dilakukan di perguruan tinggi maupun lembaga non perguruan tinggi. Proses pembelajaran di luar perguruan tinggi dalam kebijakan merdeka belajar dapat dilakukan dengan beberapa model, di antaranya; model blok, model nonblok, model percepatan dan model lain yang sesuai dengan karakteristik program studi. Penyetaraan bobot kegiatan merdeka belajar

(rekognisi) secara umum dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk bebas (free form) dan bentuk terstruktur (structured form). Bentuk bebas adalah kegiatan merdeka belajar setara dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program yang bersesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan (DIRJEN-DIKTI, 2020).

Dibutuhkan Petunjuk Teknis dalam bentuk Panduan dan Prosedur Operasional Baku redistribusi matakuliah dan rekognisi kegiatan MBKM agar tujuan penyelenggaraan 8 model kegiatan MBKM dapat dilaksanakan secara maksimal.



Gambar 4 Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT (DIRJEN-DIKTI, 2020)

Solusi Permasalahan

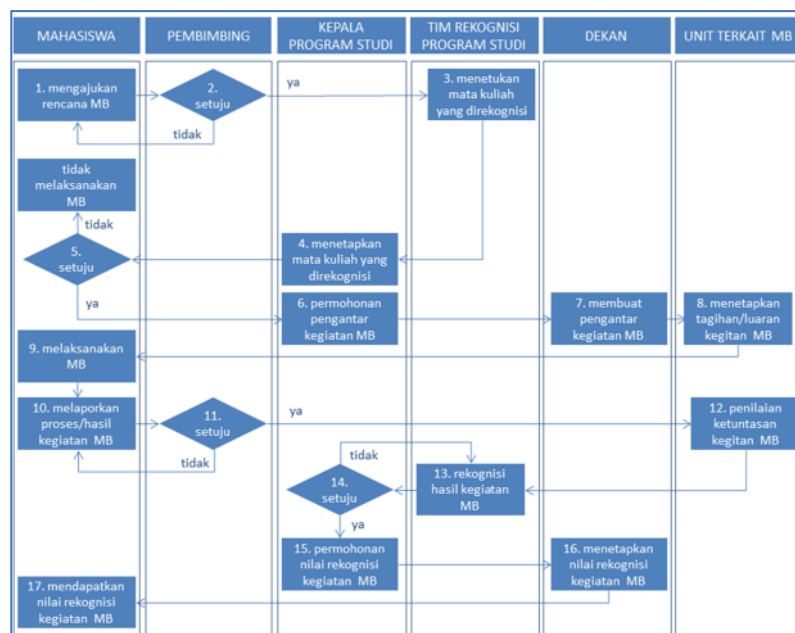
Kebijakan MBKM mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020. Universitas Sebelas Maret telah menyusun paket PRGS untuk implemntasi MBKM yang terdiri dari Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No 31 tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Sarjanan, Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi; KKNI- era RI 4.0, Society 5.0-MBKM, dan Panduan Pelaksanaan Medeka Belajar Kampus Merdeka.

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan MBKM di Universitas Muhammadiyah Purworejo diperlukan petunjuk Teknis dalam bentuk Pandauan dan Prosedur Operasional Baku redistribusi matakuliah sekurang-kurangnya 84 sks terdistribusi dalam 5 semester dan 60 sks yang secara fleksibel dapat diambil oleh mahasiswa dalam kegiatan MBKM.

Semester	Jumlah sks	Jumlah MK	Kelompok Mata Kuliah								
			MKW PT	MKW UNS	MKW		MKP - MBKM				
					Fak/Program Studi		1	2	...	N	
VIII											
VII											
VI											
V											
IV											
III											
II											
I											
Jumlah											

Gambar 5 Matrik distribusi matakuliah dalam kurikulum MBKM UNS (LPPMP-UNS, 2020)

Program studi wajib memfasilitasi proses pembelajaran di luar perguruan tinggi sesuai model yang dipilih mulai semester 5 (lima). Untuk keperluan ini, program studi diharapkan dapat melakukan re-distribusi mata kuliah wajib Undang-undang PT, mata kuliah wajib Universitas, mata kuliah wajib Fakultas/Program Studi, dan mata kuliah pilihan Program Studi. Dalam implementasi pelaksanaan program MBKM akan banyak variasi bentuk, model dan pola rekognisinya. Perlu dikembangkan alur pelaksanaan MBKM hingga proses rekognisi dalam upaya penjaminan mutu program.



Gambar 6 Diagram Alir Pelaksanaan MBKM UNS (LPPMP-UNS, 2020)

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyusunan petunjuk teknis dan workshop pendampingan implementasi. Detail kegiatan terdiri atas:

- Penyusunan petunjuk teknis redistribusi matakuliah dalam kurikulum MBKM
- Penyusunan petunjuk teknis rekognisi kegiatan MBKM
- Workshop redistribusi mata kuliah dalam kurikulum MBKM
- Workshop rekognisi kegiatan MBKM

Penyusunan petunjuk teknis melibatkan kedua belah pihak dalam melakukan identifikasi kebutuhan sesuai karakter institusi, dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Purworejo. Hasil analisis kebutuhan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen untuk meningkatkan kapasitas kerjasama kelembagaan dalam pelaksanaan MBKM. Kerjasama kelembagaan yang dimaksud adalah kerjasama Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan Perguruan Tinggi lain dan atau Lembaga Non Perguruan Tinggi lainnya. Workshop pendampingan implementasi melibatkan tim ahli dari Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Universitas Sebelas Maret. Produk pendampingan dalam bentuk redistribusi mata kuliah yang menjamin fleksibilitas pelaksanaan MBKM dan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan kerja abad 21. Model rekognisi kegiatan MBKM dalam bentuk struktur atau bebas sesuai karakteristik Program Studi diharapkan dapat menjamin pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Proses pelaksanaan kurikulum dan rekognisi kegiatan MBKM diharapkan dapat menjamin mahasiswa lulus tepat waktu dengan kompetensi tinggi sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan program pengabdian masyarakat P2M PNBP Universitas Sebelas Maret ini bersama mitra yaitu Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan analisis situasi. Analisis ini untuk mengetahui kondisi dari mitra. Kemudian persiapan implementasi MBKM yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Purworejo melalui *Forum Group Discussion* (FGD). Langkah selanjutnya adalah kerjasama lembaga dalam penerapan kurikulum MBKM dengan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan BMT Binamas Purworejo dengan Fakultas Ekonomi. Selain penandatanganan kerjasama, diadakan juga Workshop Kewirausahaan MBKM di Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan. Sampai saat



ini, pertukaran pelajar, magang industri, dan kegiatan keriausahaan menjadi program implemntasi MBKM di UMPwr yang sudah matang persiapannya. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah dibutuhkannya Petunjuk Teknis dalam bentuk Pandauan dan Prosedur Operasional Baku redistribusi matakuliah dan rekognisi kegiatan MBKM agar tujuan penyelenggaraan 8 model kegiatan MBKM dapat dilaksanakan secara maksimal. Solusi permasalahan tersebut adalah lebih mengoptimalkan pelaksanaan MBKM di Universitas Muhammadiyah Purworejo diperlukan petunjuk Teknis dalam bentuk Pandauan dan Prosedur Operasional Baku redistribusi matakuliah sekurang-kurangnya 84 sks terdistribusi dalam 5 semester dan 60 sks yang secara fleksibel dapat diambil oleh mahasiswa dalam kegiatan MBKM. Kemudian program studi wajib memfasilitasi proses pembelajaran di luar perguruan tinggi sesuai model yang dipilih mulai semester 5 (lima). Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyusunan petunjuk teknis dan workshp pendampingan implemnatsi. Detail kegiatan terdiri atas: (a) Penyusunan petunjuk teknis redistrtribusi matakuliah dalam kurikulum MBKM, (b) Penyusunan petunjuk teknis rekognisi kegiatan MBKM, (c) Workshop redistribus mata kuliah dalam kurikulum MBKM, (d) Workshop rekognisi kegiatan MBKM

KESIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dengan mitra Universitas Muhammadiyah Purworejo ini telah menghasilkan MoU Kerjasama dalam implementasi pelaksanaan MBKM. Kemudian berbagai kegiatan telah dilaksanakan seperti workshop dan pertukaran mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

1. UMPwr, 2018. [<http://umpwr.ac.id>. Cited: Januari 11, 2021.] <http://umpwr.ac.id/index.php/about>.
2. Kemdikbud, 2020. [<https://pddikti.kemdikbud.go.id/>. Cited: Januari 11, 2021.] https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/OTk5MUVCNUYtOEMzQi00NERFLThGMEEtMEZBQ0QxMkQ0OTJF.
3. UMPwr. 2020. [<http://pmat.umpwr.ac.id/>. Cited: Januari 11, 2021.] <http://pmat.umpwr.ac.id/?p=4000>.
4. Ahmad, N. 2020. [Cited: Januari 11, 2021.] <http://purworejonews.com/berita/terapkan-mbkm-fakultas-ekonomi-ump-gandeng-pdau-dan-bmt-binamas/>.
5. Sujono. 2020. [Cited: Januari 11, 2021.] <http://koranjuri.com/prodi-teknik-otomotif-um-purworejo-gelar-workshop-kewirausahaan-mbkm/>.



6. HUMAS-UNS. 2020. [Cited: Januari 2020, 2021.] <https://uns.ac.id/id/uns-update/presiden-tandatangani-pp-uns-ptn-bh-uns-bersiap-masuk-masa-transisi.html>.
7. Kemdikbud. <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>. 2020. [Cited: Januari 11, 2021.] https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/NUJGM0FDMUQtMzZGNC00MzM4LUFDMEUtMTA2RDY5N0MzMzAx.
8. LPPMP-UNS. 2020. Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, KKNI-RI 4.0-Society 5.0-MBKM. Surakarta : UNS Press., 978-602-3970383-5.
9. DIRJEN-DIKTI. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
10. DIRJEN-DIKTI. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
11. LPPMP-UNS. 2020. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Surakarta : UNS Press.